

**EFEKTIVITAS INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA CPO  
(CRUDE PALM OIL) DI PASAR KOMODITAS INTERNASIONAL  
TAHUN 2007-2011**

**Danty Ayu Lestari\***  
**Email: dantyayu@gmail.com**  
**Dosen Pembimbing: Yuli Fachri, S.H, M.Si**

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

*Abstract*

*This research describes how the effectiveness of the Indonesia government adopted a policy that Indonesia can be a determinant of the price of CPO in the international commodity market. Indonesia is the world's largest palm oil producer since 2007, but global CPO market still refers to the physical market and the futures market Rotterdam / derivatives Malaysian Derivative Exchange (MDEX) in Kuala Lumpur as the CPO's market price. Indonesia also determines the price and has a strong position in the international palm oil trade but not effective yet, the trade liberalization needs to be done to reduce export duties, strengthen coordination between government, employers and local communities, in addition to the need for support from the government to build infrastructure and strengthen negotiations at international level.*

*Keywords: Commodity, CPO, Price Reference, Rotterdam*

---

\* Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau (1101112254)

## Pendahuluan

Penelitian ini merupakan studi kajian hubungan internasional dengan konsentrasi Ekonomi Politik Internasional yang akan membahas tentang Efektivitas Indonesia dalam Penentuan Harga CPO di pasar Komoditas Internasional pada tahun 2007-2011.

Pada masa sekarang ini, perdagangan dilakukan melalui bursa dengan menggunakan surat berharga sebagai alat transaksi. Bursa berjangka merupakan tempat terlaksananya transaksi jual beli kontrak berjangka atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan pada harga tertentu berdasarkan peraturan dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini maka pasar berjangka bermanfaat bagi petani produsen dan pihak-pihak yang memerlukan harga sebagai referensi untuk kepentingan usahanya. Memang pada saat ini nilai ekspor/impor suatu negara lebih didominasi oleh barang manufaktur. Nilai perdagangan komoditas yang merupakan bahan mentah (*raw materials*) masih kalah jika dibandingkan nilai perdagangan barang manufaktur seperti otomotif dan elektronik. Namun proses manufaktur tidak dapat terjadi tanpa adanya bahan mentah sebagai bahan baku. Terlebih lagi barang komoditas terutama komoditas pertanian merupakan kebutuhan primer manusia untuk dapat bertahan hidup sehingga komoditas merupakan kebutuhan yang tidak tergantikan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Marian Radetzki. *A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy*. (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008) hlm. 21

Hal tersebut menunjukkan pentingnya komoditas dan bursa komoditas dalam perdagangan internasional. Di Indonesia terdapat dua bursa yang melayani transaksi komoditas, yaitu Bursa Berjangka Jakarta/*Jakarta Futures Exchange* (BBJ/JFX) dan *Indonesia Commodity and Derivatives Exchange* (ICDX). Bursa Berjangka Jakarta merupakan bursa pertama yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. JFX memiliki fungsi utama dalam menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk melakukan transaksi kontrak Berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronik.<sup>2</sup>

ICDX merupakan bursa yang didirikan untuk melayani kepentingan ekonomi daerah sebagai pusat perdagangan global untuk memberikan kepastian harga baik untuk pihak penjual atau pihak pembeli. Transaksi yang dilakukan di ICDX termasuk sistem transaksi multilateral. Transaksi multilateral merupakan transaksi antar berbagai pihak dengan banyak pihak lainnya sehingga lawan transaksi tidak perlu diketahui dan semua transaksi terjadi dalam suatu market yang terorganisir atau di dalam suatu bursa.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>“Bursa Berjangka Jakarta” <<http://centralfutures.com/perdagangan-berjangka/bursa-berjangka-jakarta/>> diakses pada 10 April 2014 pukul 06:57 WIB

<sup>3</sup>“ICDX” <<http://www.foreximf.com/produk/multilateral/icdx/>> diakses pada 25 Januari 2015 pukul 09.04 WIB

Pentingnya peran bursa komoditas sebagai tempat transaksi dalam perdagangan internasional membuat harga komoditas di suatu pasar bursa dapat menjadi patokan harga suatu komoditas secara internasional. Bursa sebagai tempat utama bertemunya permintaan dan penawaran membuat bursa menjadi tempat penentuan harga. Namun tidak semua bursa komoditas dapat menjadi patokan/penentu harga (*price reference*) dari harga suatu barang. Syarat utama bagi suatu bursa untuk dapat digunakan sebagai patokan harga secara internasional adalah nilai dan volume transaksi yang tinggi dalam perdagangan bursa tersebut. Selain itu, diperlukan pula adanya pasar yang transparan, independen, dan dipercaya oleh semua pihak.

Belum ditetapkannya bursa lokal sebagai acuan harga ekspor menjadi salah satu titik masalah Indonesia tidak mampu berdaulat pada komoditinya sendiri. Karena jika selalu mengacu pada bursa luar negeri kerap merugikan, dimana harga acuan luar negeri tersebut tidak merefleksikan *supply* dan *demand*. Bukan tidak mungkin, pada pedagang dan sesama konsumen saling melakukan transaksi agar harga CPO tertekan. Prinsipnya, kontrak kerjasama yang menggunakan acuan harga luar negeri cenderung merugikan Indonesia sebagai produsen. Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar pula. Namun, hingga saat ini Indonesia belum dapat berperan

banyak dalam sisi pemasaran, terutama sebagai referensi untuk mematok harga komoditas tersebut. Pasar CPO global masih mengacu pada pasar fisik Rotterdam dan pasar berjangka/derivatif *Malaysian Derivative Exchange* (MDEX) di Kuala Lumpur sebagai harga pasar CPO dunia. Dengan kelebihanannya, Indonesia seharusnya dapat menjadi pengimbang dalam penentuan harga CPO internasional, namun yang terjadi harga justru ditentukan pasar.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada keefektifan upaya pemerintah Indonesia agar Indonesia bisa menjadi penentu harga CPO di pasar komoditas internasional. Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga likuiditas di pasar fisik lokal. Pasalnya, Industri di bursa berjangka sangat bergantung dengan regulasi dan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Tidak hanya pada sebatas perdagangan CPO semata, namun juga pada komoditi unggulan Indonesia yang belum diperdagangkan di bursa komoditi Indonesia, sangat memerlukan aturan pendukung melalui regulasi kementerian terkait. Salahsatu contoh aturan pendukung adalah kewajiban bagi eksportir untuk melaporkan setiap transaksi ekspornya ke bursa. Sehingga melalui laporan harga ekspor tersebut akan dianalisis lebih jauh untuk memperoleh harga rata-rata acuan. Pada akhirnya, dengan dimulainya harga patokan ekspor perdagangan CPO melalui bursa lokal, maka diharapkan industri-industri pemakai bahan baku CPO, mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam kegiatan pembelian, di

samping memberikan juga kesempatan pada masing-masing produsen dapat memasarkan produknya secara langsung di pasar. Dengan komposisi pelaku pasar yang lebih bervariasi, maka diharapkan pasar fisik CPO menjadi semakin luas yang pada gilirannya nanti diharapkan dapat menjadi salah satu barometer pasar fisik CPO dunia.

Penelitian ini menggunakan perspektif liberal bahwa cara yang paling efektif untuk meningkatkan kekayaan suatu Negara adalah dengan membiarkan individu-individu di dalamnya secara bebas berinteraksi dengan para individu Negara lain. Berdasarkan pada gagasan mengenai kedaulatan pasar dalam ekonomi, dengan mengasumsikan bahwa semua manusia secara alamiah memiliki keselarasan kepentingan. Karena itu, jika individu dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi faktor-faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan individu, nasional akan meningkat. Keputusan para pelaku ekonomi mengenai apa yang harus diproduksi dan dijual berdasarkan pertimbangan keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Yakni setiap Negara harus memiliki spesialisasi dalam produksi barang sehingga memiliki keuntungan komparatif (harga terendah, waktu produksi tercepat) tertinggi dari pada rekanan dagang yang lain. Dan inilah yang dijadikan komoditas ekspor. Sedangkan Negara tersebut lebih baik mengimpor barang-barang luar negeri yang memiliki posisi keuntungan komparatif lebih baik.

Sehingga dari sini efisiensi terjadi. Peran Negara sangat terbatas pada penyediaan fondasi bagi bekerjanya system pasar, seperti pembangunan infrastruktur, penegakkan hukum, menjamin keamanan, mencegah persaingan tidak sehat, dan menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, menurut persektif liberal, ekonomi dan politik merupakan bidang yang terpisah.

Penulis menggunakan konsep liberalisasi perdagangan (trade liberalization), penulis berkeinginan menjawab sebagian dari pertanyaan permasalahan. Penulis memilih konsep liberalisasi perdagangan karena dalam perdagangan terutama di dalam bursa, prinsip utama yang dipakai pembeli dan penjual adalah asumsi terhadap efisiensi dan pasar bebas.

Dengan konsep liberalisasi perdagangan yang penulis ajukan, maka penulis ingin menganalisa faktor yang menyebabkan terhalangnya Indonesia dalam rangka menjadi penentu harga. Selain itu, adanya masalah luar negeri dapat dianalisa pula dengan konsep ini dengan cara melihat apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip liberalisasi perdagangan yang telah disepakati di dalam WTO. UNCTAD sebagai lembaga yang menaungi perdagangan komoditas selalu menekankan pada adanya liberalisasi perdagangan. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis memilih konsep liberalisasi perdagangan sebagai konsep awal penulis dalam menjawab pertanyaan permasalahan.

Fokus penelitian ini adalah Teori Kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan

keputusan. Menurut Richard Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurut Titmuss kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*).<sup>4</sup> Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Dunn menyebutkan bahwa analisis kebijakan mengkaji kebijakan yang telah berjalan, ruang lingkup serta metoda analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat dari suatu kebijakan.<sup>5</sup> Dari kajian kebijakan tersebut diharapkan dapat memperoleh kesimpulan apakah kebijakan yang telah dijalankan efektif atau tidak. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam usaha menjadi penentu harga CPO Internasional diwujudkan dalam pemerintah dan pengusaha dengan cara meningkatkan produksi CPO. Keinginan agar Indonesia tumbuh menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh besar di pasaran internasional khususnya dalam soal penentuan harga CPO. Penentuan harga itu yang diharapkan menjadi rujukan bagi pedagang dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah

---

<sup>4</sup> Titmuss, Richard, (1974). *Social Policy : An Introduction*, Allen and Unwin, London

<sup>5</sup> Dunn, William N. (1981), *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall

Indonesia untuk mengambil kebijakan, misalnya dalam menentukan bea keluar atau pungutan ekspor dalam upaya stabilisasi harga CPO.

### **Hasil dan Pembahasan**

Seiring terbatasnya persediaan bahan bakar minyak bumi, permintaan minyak nabati sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) semakin meningkat. Perkembangan produksi komoditas pertanian penghasil minyak nabati dunia setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama minyak kelapa sawit. Pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya lebih tinggi dengan tingkat pertumbuhan produksi sebesar 7,98 persen, sedangkan pertumbuhan produksi terendah yaitu sebesar 0,57 persen ditempati oleh minyak kelapa.

Secara global produksi minyak nabati semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan penambahan luasan areal perkebunan serta penggunaan bibit unggul sehingga menambah produksi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia, akan menambah konsumsi dan produksi minyak nabati dunia.

Saat ini suplai minyak nabati dunia menduduki peringkat atas, selain dipasok oleh sekitar 30 juta ton *soya bean oil*, minyak sawit (CPO) sekitar 26 juta ton, dan pasokan lain oleh *soft oil*, *animal fat* dan *other vegetable*. Akan tetapi diperkirakan pada periode setelah tahun 2006 suplai minyak nabati terbesar akan datang dari minyak sawit (CPO) dengan produksi sebesar 36,3 juta ton. Pada saat itu, *soya bean oil* mencapai produksi 35,2 juta ton. Karena itu, *soya bean oil* belum menjadi ancaman bagi perdagangan

minyak sawit.<sup>6</sup> Pemanfaatan CPO untuk produk olahan diantaranya yaitu oleh industri pangan (minyak goreng, margarin, shortening, *cocoa butter substitutes*, *vegetable ghee*) dan industri non pangan seperti oleokimia (fatty acid, fatty alcohol, gliserin) dan biodiesel.

Penduduk dunia tahun 2002 mencapai 6,3 miliar orang, dimana Cina dan India yang berpenduduk paling banyak merupakan konsumen minyak terbesar di dunia, konsumsi minyak Cina melonjak menjadi 76 persen. Sementara India 45 persen dari konsumsi minyak makan (*edible oil*) tergantung kepada impor. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk maka akan terjadi kenaikan kebutuhan konsumsi minyak makan, dengan demikian volume produksi minyak makan (*olein*) dunia terdongkrak, yang akhirnya mendorong pertumbuhan *Crude Palm Oil* (CPO), sebagai salah satu bahan baku utama minyak makan.<sup>7</sup>

Dengan meningkatnya kebutuhan CPO dunia maka pasar CPO dunia semakin terbuka. India dan Cina diperkirakan mampu menyerap tambahan sekitar masing-masing 1,5 juta ton CPO per tahun. Data *Oil World* memperlihatkan rata-rata pertumbuhan terdongkrak, yang akhirnya mendorong pertumbuhan *Crude Palm* impor CPO dari empat importir CPO terbesar dunia, yaitu

India sebesar 23,1 persen, Cina 9,7 persen, Uni Eropa 10,5 per sen dan Pakistan 3,2 persen merupakan pasar yang sangat menjanjikan. Produksi minyak sawit dunia diperkirakan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut *oil world*, pada tahun 2010 diprediksi mencapai sekitar 42 juta ton.

Pertumbuhan produksi untuk minyak kelapa sawit pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan menjadi 25.340.360 ton (26,5%) dari total produksi jenis minyak nabati. Pada periode tersebut, pangsa konsumsi minyak kelapa sawit mulai mengungguli minyak kedele dan kondisi tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga tahun 2020.

Meningkatnya permintaan dunia akan CPO setiap tahunnya menyebabkan perkembangan harga CPO sepanjang tahun 2002-2007 cenderung mengalami kenaikan rata-rata 5% pertahun. Pada tahun 2008, harga CPO melonjak drastis sehubungan dengan naiknya harga minyak mentah dunia.

Sejak beberapa tahun yang lalu di dunia sedang dikembangkan bahan bakar alternatif yang berbasis sumber daya hayati diantaranya ditandai dengan bermunculannya pabrik Biodiesel yang memanfaatkan CPO sebagai bahan bakunya. Kebutuhan dunia akan BBM diperkirakan mencapai 1 milyar ton pertahun, dan substitusi menggunakan bahan bakar alternatif telah menciptakan prospek pasar yang berkelanjutan bagi pelaku usaha perkebunan sawit. Meningkatnya permintaan dunia akan CPO setiap tahunnya menyebabkan

---

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia, Departemen Perindustrian Jakarta, 2009. Alamat Website : [http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUMUT\\_1.pdf](http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUMUT_1.pdf)  
> diakses pada tanggal 20 April 2015 Pukul 17:46 WIB

<sup>7</sup> *Ibid.*

perkembangan harga CPO sepanjang tahun 2002-2007 cenderung mengalami kenaikan rata-rata 5% pertahun. Pada tahun 2008, harga CPO melonjak drastis sehubungan dengan naiknya harga minyak mentah dunia. Harga CPO di pasar internasional dipengaruhi oleh harga minyak mentah dan produksi minyak nabati lainnya terutama minyak kedelai.

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu produk yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, komoditas ini berhasil menyumbangkan devisa pada pendapatan negara pada sebesar lebih dari US\$ 16,4 miliar pada 2010 yang mengalami peningkatan 50% dari tahun 2009.<sup>8</sup> Suatu angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan sumbangsi sektor non-migas lainnya. Industri kelapa sawit merupakan sektor Industri terbesar kedua setelah pertanian khususnya padi.

Saat ini Indonesia dan Malaysia menguasai 86,55 % pangsa pasar CPO dunia. Indonesia menguasai pangsa pasar sebesar 39,34 %, sedangkan Malaysia sebesar 47,21 %, sisanya dikuasai oleh negara lain. Indonesia mampu mengekspor 40,34 % dalam bentuk CPO dan 59,66 % dalam bentuk produk olahan CPO, sedangkan Malaysia mengekspor 16,38 % dalam bentuk CPO dan 83,62 % dalam bentuk produk olahan CPO. Bila kita kaji lebih lanjut, Indonesia lebih unggul dari

Malaysia dalam hal ekspor bahan bakunya (CPO) tetapi Malaysia unggul dalam hal produk turunannya yang mempunyai nilai tambah jauh lebih tinggi daripada CPO nya. Kekuatan utama yang dimiliki Malaysia dibandingkan dengan Indonesia adalah dalam inovasi dan dukungan infrastruktur. Malaysia memiliki satu badan khusus yang mengurus perkembangan industri sawit yaitu *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB). Badan ini memiliki tujuan untuk menjadi lembaga riset dan pengembangan yang menyediakan acuan dan pedoman bagi perkembangan industri minyak sawit yang berkelanjutan dan mampu bersaing secara global.

Kemajuan dalam perdagangan CPO internasional tentu tidak dapat dilepaskan dari kinerja industri kelapa sawit. Kemajuan industri sawit Indonesia akan memperkuat posisi tawar Indonesia di dalam perdagangan internasional. Perkembangan industri sawit salah satunya dipengaruhi oleh program dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Berikut rancangan program dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengembangan industri sawit Indonesia. Data penulis kutip dari situs Departemen Pertanian Indonesia.<sup>9</sup>

Jangka Panjang dari pengembangan agribisnis kelapa sawit hingga tahun 2025 adalah:

---

<sup>8</sup>“Raksasa CPO di Indonesia Makin Agresif Ekspansi” Alamat Website: <<http://duniaindustri.com/agroindustri/440-raksasa-cpo-di-indonesia-makin-agresif-ekspansi.html?tmpl=component&print=1&page>> di akses 22 Februari 2015, pukul 22.46 WIB

---

<sup>9</sup>“Prospek dan Arah Pengembangan Industri Sawit” Alamat Website: <<http://www.litbang.deptan.go.id/special/komoditas/b4sawit>> diakses pada 10 Maret 2015 pukul 15:13 WIB

1. Produktivitas rata-rata kelapa sawit 20 ton TBS/ha,
2. Pendapatan petani antara US\$ 2.000 - 2.500/KK/tahun, dimana pendapatan ini terkait dengan harga yang diterima petani yaitu minimal 80% dari harga FOB dan petani mempunyai saham di unit pengolahan,
3. Produksi kelapa sawit Indonesia 23 juta ton, dan alokasi untuk konsumsi dalam negeri mencapai 12 juta ton,
4. Sistem distribusi dan transportasi produk CPO yang efisien,
5. Sistem produksi *zero waste product/green product* diterapkan secara kontinyu dan konsisten,
6. Terjaminnya investasi di bidang kelapa sawit yang didukung oleh dana khusus pengembangan kelapa sawit, dan
7. Industri hilir CPO, khususnya oleokimia dan biodiesel berkembang.

Sedangkan sasaran khusus Jangka Menengah pengembangan agribisnis kelapa sawit pada tahun 2010 adalah:

1. Bibit kelapa sawit tersedia secara cukup dan mudah terjangkau dan tidak adanya bibit kelapa sawit palsu,
2. Produktivitas rata-rata kelapa sawit meningkat menjadi 15 ton TBS/ha,
3. Produksi kelapa sawit Indonesia akan mencapai 15,3 juta ton, dan alokasi untuk konsumsi dalam negeri mencapai 6 juta ton. Peningkatan produksi tersebut

diantaranya berasal dari perluasan sekitar 50.000-60.000 ha

4. Pendapatan Petani Pekebun mencapai US\$ 1.500-2.000/KK/tahun. Pendapatan ini terkait dengan harga yang diterima petani yaitu minimal 80% dari harga FOB dan petani mempunyai saham di unit pengolahan,
5. Peningkatan diversifikasi produk kelapa sawit,
6. Pengembangan pasar bagi produk turunan kelapa sawit,
7. Penerapan secara konsisten *Good Agricultural*.

Penulis akan memaparkan faktor-faktor permasalahan yang mempengaruhi Indonesia untuk menjadi penentu harga CPO, baik masalah di dalam negeri maupun luar negeri. Sejak akhir 2006 Indonesia telah menjadi produsen CPO terbesar di dunia, namun Indonesia masih belum menjadi penentu harga CPO. Dalam perdagangan CPO, Indonesia lebih sering mengalah pada pembeli dalam penentuan harga akibat kurang kuatnya posisi tawar. Agar Indonesia dapat menjadi penentu harga dalam perdagangan CPO internasional, Indonesia perlu memperkuat industri CPO dalam negeri serta memperkuat diplomasi ke luar untuk mengatasi isu-isu negatif terhadap industri CPO Indonesia. Prinsip pasar bebas yang ditekankan oleh WTO membuat persaingan antara produsen dipengaruhi oleh *competitive advantage* yang dimiliki oleh produsen tersebut.

Belum tuntasnya masalah tata ruang nasional dan RTRWP yang

sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir membuat para investor dan para pemegang konsensi memilih “*wait and see*”. Pokok permasalahannya adalah tidak sinkronnya antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status legalitas lahan untuk pengembangan kelapa sawit.

Masalah infrastruktur merupakan salah satu masalah utama yang menghambat perkembangan industri CPO Indonesia. Sampai sekarang pembangunan infrastruktur untuk memperlancar dan meningkatkan efisiensi dari distribusi CPO belum banyak kemajuannya. Salah satu masalah yang menghambat Indonesia menjadi penentu harga CPO di sektor infrastruktur adalah ketiadaan pelabuhan besar bagi pengangkutan CPO selain Belawan dan Dumai. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembangunan industri sawit di dalam paket MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Program ini sejatinya merupakan cita-cita besar pemerintah sejak lama. Namun, penegasannya baru dideklarasikan saat Peringatan Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 2011 lalu. MP3EI merekomendasikan pembenahan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur karena produksi CPO di wilayah Kalimantan dan Sulawesi sangat memengaruhi produksi CPO di Indonesia. 30% produksi CPO Indonesia berasal dari kedua wilayah tersebut. Dengan adanya pembangunan pelabuhan baru, akan mengurangi antrian di pelabuhan Belawan dan Dumai. Hal

tersebut berarti ekspor akan menjadi lebih lancar.

Penyebab utama dari terkendalanya pembangunan infrastruktur pendukung industri CPO adalah tidak adanya dana bagi hasil dari pajak yang dibebankan pemerintah pada ekspor CPO. Selama ini dana bagi hasil (DBH) untuk industri sawit masih belum dianggarkan oleh pemerintah.<sup>10</sup> Hal tersebut berbeda dengan sektor migas yang daerah penghasilnya mendapat hasil dari migas yang dieksploitasi dari daerah tersebut. Selama ini bea keluar yang ditetapkan pemerintah terhadap ekspor CPO masuk sepenuhnya ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mendapat porsi dari pemasukan hasil bea keluar ekspor CPO. Hal tersebut dinilai oleh pemerintah daerah sebagai ketidakadilan. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berperan dalam mendukung kemajuan industri CPO, namun kurang mendapat jatah anggaran untuk membiayai pembangunan daerah.

Adapun masalah dari luar negeri, kampanye anti-sawit, isu ini tidak akan mereda, bahkan akan makin kuat sejalan dengan terus meningkatnya permintaan dunia akan minyak nabati baik untuk food maupun fuels. Tema kampanye anti-sawit masih akan dikaitkan dengan isu perubahan iklim maupun

---

<sup>10</sup> “Sawit Masih Jadi Penggerak Roda Ekonomi Riau” Alamat Website: <<http://www.bumn.go.id/ptpn5/id/galeri/sawit-masih-jadi-penggerak-roda-ekonomi-riau/>> diakses pada 12 Maret 2015 pukul 05.45 WIB

kerusakan *biodiversity* khususnya orang utan.

Deforestasi dan pembukaan lahan gambut tetap akan menjadi obyek serangan negara maju dan NGO, dengan dalih sebagai penyebab utama kematian orang utan, kerusakan lingkungan dan emisi gas rumah kaca (GRK). Bahkan kampanye anti-sawit akan dilakukan dalam berbagai bentuk oleh berbagai pihak. Tidak saja NGO, *group consumers* juga akan terus melakukan *pressure* dengan memberlakukan standar-standar baru dalam perdagangan minyak sawit. Negara Uni Eropa dan Amerika Serikat tetap akan membuat regulasi perdagangan dalam *non-tariff barrier* kepada minyak sawit sebagai bahan baku biofuel.

Salah satu isu utama yang membuat kritik terhadap industri sawit adalah peran perkebunan sawit terhadap percepatan pemanasan global dan perubahan iklim. Masalah perubahan iklim yang sudah menjadi agenda global PBB kembali dibahas dalam *Climate Summit-COP 17* di Durban, Afrika Selatan, November 2011. Ada upaya dari negara maju untuk tidak memperpanjang Kyoto Protocol sebagai satu-satunya kesepakatan yang mengikat bagi negara maju. Pelajaran bagi Indonesia adalah, seharusnya Indonesia tidak naif, bahwa isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan deforestasi dan pembukaan lahan gambut untuk pengembangan sawit seolah-olah benar adanya dan sesuatu yang mendesak. Indonesia harus menyadari bahwa pengurangan emisi hanya isu yang masih penuh kontroversi, dan dikaitkannya emisi

GRK dengan pengembangan sawit semata-mata hanyalah bagian dari kampanye anti-sawit oleh negara maju.

Indonesia memang perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun *equal treatment* yang diterapkan terhadap Indonesia akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia masih memerlukan proses untuk mencapai standar seperti yang diinginkan oleh negara maju. Seharusnya Indonesia selaku produsen terbesar CPO mampu memaksakan kepentingannya agar CPO Indonesia diterima oleh semua negara sekaligus sembari meningkatkan sustainabilitas industri sawit Indonesia. Penulis melihat bahwa tekanan yang dilakukan oleh negara maju terhadap CPO Indonesia lebih didasari pada upaya melindungi pertanian negara tersebut. CPO merupakan minyak nabati paling efisien dan murah sehingga akan mengancam produksi minyak nabati beberapa negara.

### **Simpulan**

Indonesia menjadi penghasil CPO terbesar di dunia sejak 2007 dengan produksi mencapai 15,9 juta ton. Produksi CPO Indonesia yang sedemikian besar tidak diimbangi dengan kekuatan tawar Indonesia di dalam perdagangan internasional. Indonesia masih menjadi negara produsen CPO yang harga produknya belum ditentukan oleh negara sendiri. Bahkan pemerintah Indonesia berpatokan pada harga di bursa Rotterdam dalam penentuan bea keluar CPO. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk harga referensi CPO dunia di Indonesia adalah dengan membuka

perdagangan CPO di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan *Indonesian Commodity and Derivatives Exchange* (ICDX). Namun hingga tahun 2011, pemerintah Indonesia masih menggunakan bursa Rotterdam sebagai patokan penentuan bea keluar.

Salah satu tanda bahwa Indonesia belum menjadi penentu harga CPO adalah ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasi isu-isu negatif terhadap industri sawit nasional. Ekspor CPO Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh isu-isu negatif terutama isu lingkungan yang dikeluarkan oleh negara maju dalam rangka melindungi industri minyak nabati negara tersebut.

Untuk menjadi penentu harga, Indonesia perlu memperkuat industri sawitnya dengan mengatasi berbagai masalah yang ada. Industri sawit Indonesia terhambat berbagai masalah baik dari dalam maupun luar negeri. Masalah dalam negeri yaitu ketidakpastian hukum dalam pengembangan lahan kelapa sawit, keterbatasan infrastruktur penunjang industri sawit, perpajakan dan bea keluar tinggi, hingga masalah bentrok antara pengusaha dengan masyarakat lokal. Sedangkan masalah-masalah luar negeri yang melemahkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan CPO internasional adalah kampanye anti-sawit, isu perubahan iklim, serta belum diterimanya ISPO sebagai alternatif standar sustainability industri sawit. Masalah-masalah tersebut merupakan penyebab dari ketidakmampuan Indonesia dalam menjadi penentu harga.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall
- Marian Radetzki. 2008. *A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Titmuss, Richard. 1974. *Social Policy : An Introduction*, Allen and Unwin, London

### Website

- Bursa Berjangka Jakarta. Alamat Website: <  
<http://centralfutures.com/perdagangan-berjangka/bursa-berjangka-jakarta/>>  
diakses pada 10 April 2014 pukul 06:57 WIB
- Direktorat Jenderal Industri Agro Dan Kimia ,Departemen Perindustrian Jakarta, 2009. Alamat Website : <  
[http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUM\\_UT\\_1.pdf](http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KICSUM_UT_1.pdf) > diakses pada tanggal 20 April 2015 Pukul 17:46 WIB
- ICDX. Alamat Website:<  
<http://www.foreximf.com/prодук/multilateral/icdx/>>  
diakses pada 25 Januari 2015 pukul 09.04 WIB
- Prospek dan Arah Pengembangan Industri

Sawit. Alamat Website:  
<<http://www.litbang.deptan.go.id/special/komoditas/b4sawit>> diakses pada 10  
Maret 2015 pukul 15:13  
WIB

Raksasa CPO di Indonesia Makin  
Agresif Ekspansi. Alamat  
Website:  
<<http://duniaindustri.com/agroindustri/440-raksasa-cpo-di-indonesia-makin-agresif-ekspansi.html?tmpl=component&print=1&page>> di  
akses 22 Februari 2015,  
pukul 22.46 WIB

Sawit Masih Jadi Penggerak Roda  
Ekonomi Riau. Alamat  
Website:  
<<http://www.bumn.go.id/galeri/sawit-masih-jadi-penggerak-roda-ekonomi-riau/>> diakses pada 12 Maret  
2015 pukul 05.45 WIB